

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target			Realisasi		Data Dukung Atas Realisasi Capaian Triwulan TW II	Kendala Pencapaian Target Triwulan TW II	Rencana Aksi	Catatan Efektif dan Efisien	Kinerja RPJMD yang di jawab		Catatan Evaluasi Kemenpan RB
			PK	Renstra	Renja	Triwulan TW II	Kesesuaian Rumus Realisasi dan Rumus Dalam IKU					Menjelaskan Outcome / Keluaran IKU	Menjelaskan Kendala (6M)	

Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

1	Menyiapkan Bahan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) - (Risa Sri Hartati, SE)	Jumlah Bahan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dianalisa	2580 SP3B	2580 SP3B	2580 SP3B	1290 SP3B	Sesuai	Jumlah Bahan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dianalisa	Tidak ada Kendala		Jumlah Bahan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dianalisa	SP3B (50%)
2	Menyiapkan Bahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) - (Risa Sri Hartati, SE)	Jumlah Bahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dianalisa	2580 SP2B	2580 SP2B	2580 SP2B	1290 SP2B	Sesuai	Jumlah Bahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dianalisa	Tidak ada Kendala		Jumlah Bahan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang dianalisa	SP2B (50%)

Analisis Pajak dan Retribusi Daerah

1	Tersedianya data formulir pendaftaran/ SPOP PBB P-2 dan SPPT PBB P-2 (Lya Yuniarti, S.STP)	Jumlah Pendaftar PBB P-2 2. Jumlah SPPT PBB P-2 yang dicetak"	42000 Lembar	42000 Lembar	42000 Lembar	41.749 Lembar	Sesuai	Jumlah SPOP PBB P-2 dan SPPT PBB P-2 yang tercetak dan didistribusikan	Tidak ada kendala		Jumlah Pendaftar PBB P-2 2. Jumlah SPPT PBB P-2 yang dicetak"	Data Sismiop PBB P-2 (99,40%)
2	Tersedianya data hasil pelayanan dan pendataan PBB P-2 (Lya Yuniarti, S.STP)	Jumlah data hasil pelayanan dan pendataan	32.000 Data	32.000 Data	32.000 Data	2.053 Data	Sesuai	Jumlah data pelayanan dan pendataan wajib pajak	Tidak ada kendala		Jumlah data hasil pelayanan dan pendataan	Laporan dari PPOB dan Rekening koran (6.41%)
3	Tersedianya data induk wajib pajak dan kartu pengenalan NPWPD (Lya Yuniarti, S.STP)	Jumlah kartu pengenalan NPWPD	30 Data	30 Data	30 Data	15 Data	Sesuai	Jumlah Penerbitkan kartu NPWPD dan kartu data Wajib Pajak Daerah	Tidak ada kendala		Jumlah kartu pengenalan NPWPD	Form Pendaftaran, Kartu Data Wajib Pajak, Kartu NPWPD (50%)

4	"Tersedianya data perolehan objek pajak BPHTB dan data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB " (Lya Yuniarti, S.STP)	Jumlah SSPD BPHTB	350 Data	350 Data	350 Data	82 Data	Sesuai	Jumlah data Wajib Pajak dan Objek yang telah diverifikasi	Tidak ada kendala	Jumlah SSPD BPHTB	Form Pendaftaran, Data Wajib Pajak (23.42%)
---	---	-------------------	----------	----------	----------	---------	--------	---	-------------------	-------------------	---

Analisis Pajak dan Retribusi Daerah

1	Tersedianya formulir pelayanan pajak BPHTB dan PBB P2 (Tiara Noor Haliza, S.AK)	Jumlah formulir Pajak BPHTB dan PBB P2	1800 Formulir	1800 Formulir	1800 Formulir	719 Formulir	Sesuai	Dokumen bukti berkas pelaporan pajak BPHTB dan PBB P2	Tidak ada kendala	Jumlah formulir Pajak BPHTB dan PBB P2	Formulir BPHTB dan PBB P2 (40%)
2	Tersedianya berkas pelayanan pajak daerah (PAD) (Tiara Noor Haliza, S.AK)	Jumlah berkas pelayanan pajak daerah (PAD)	3500 Berkas	3500 Berkas	3500 Berkas	1741 Berkas	Sesuai	Berkas pelayanan pajak daerah (PAD)	Tidak ada kendala	Jumlah berkas pelayanan pajak daerah (PAD)	Rekap SPTPD dan SSPD (50%)
3	Terkumpulnya berkas pelayanan pajak daerah (PAD) (Tiara Noor Haliza, S.Ak)	Jumlah berkas SSPD dan SPTPD pelayanan pajak daerah (PAD)	3500 Berkas	3500 Berkas	3500 Berkas	1741 Berkas	Sesuai	Berkas SSPD dan SPTPD pelayanan pajak daerah (PAD)	Tidak ada kendala	Jumlah berkas SSPD dan SPTPD pelayanan pajak daerah (PAD)	Rekap SPTPD dan SSPD (50%)

Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan

1	Tersedianya Data ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang dikelola BKD, dan dalam Bentuk karcis (Fitriah, SE)	Jumlah ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang dikelola BKD, dan dalam Bentuk karcis	886 Berkas	886 Berkas	886 Berkas	758 Berkas	Sesuai	Jumlah ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang dikelola BKD, dan dalam Bentuk karcis	Tidak ada kendala	Manual melalui Microsoft Exsel
2	Tersedianya bahan untuk memproses SPOP PBB P-2 yang telah diisi oleh wajib pajak (Fitriah, SE)	Jumlah SPOP PBB P-2 yang telah diisi oleh wajib pajak	474 Berkas	474 Berkas	474 Berkas	412 Berkas	Sesuai	Jumlah SPOP PBB P-2 yang telah diisi oleh wajib pajak	Tidak ada kendala	Aplikasi SISMIOP PBB P-2

3	Tersedianya Bahan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Fitriah, SE)	Jumlah Bahan laporan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	6 Laporan	Sesuai	Jumlah Bahan laporan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tidak ada kendala	Sesuai	Manual melalui Microsoft Excel
---	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--	-------------------	--------	--------------------------------

Pengadministrasi Pajak

1	Tersedianya Data ketetapan pajak daerah (SKPD) dansurat ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang dikelola BKD, dan dalam Bentuk karcis (Rossy Nooriansyah)	Jumlah ketetapan pajak ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang dikelola BKD, dan dalam Bentuk karcis	886 Berkas	886 Berkas	886 Berkas	758 Berkas	Sesuai	Jumlah ketetapan pajak ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang dikelola BKD, dan dalam Bentuk karcis	Tidak ada Kendala		Jumlah ketetapan pajak ketetapan retribusi Daerah (SKRD) yang dikelola BKD, dan dalam Bentuk karcis	Manual Melalui Microsoft Excel (34%)
2	Tersedianya bahan untuk memproses SPOP PBB P-2 yang telah diisi oleh wajib pajak (Rossy Noorifansyah)	Jumlah SPOP PBB P-2 yang telah diisi oleh wajib pajak	474 Berkas	474 Berkas	474 Berkas	412 Berkas	Sesuai	Jumlah SPOP PBB P-2 yang telah diisi oleh wajib pajak	Tidak ada kendala		Jumlah SPOP PBB P-2 yang telah diisi oleh wajib pajak	Aplikasi SISMIOP PBB P2 (55%)

Pengadministrasi Pajak

1	Monotoring Pemeriksaan dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak Daerah (Hj. Nurul Latifah)	Menyiapkan berkas untuk monitoring pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek pajak	100 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	35 Berkas	Sesuai	Jumlah hahan konsep monitoring pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek pajak	Tidak ada Kendala		% Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB	Bidang Penagihan dan Pelaporan (35%)
2	Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan Terhadap Objek Pajak (Hj Nurul Latifah)	Terlaksananya penyusunan laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap objek pajak	100 Berkas	100 Berkas	100 Berkas	31 Berkas	Sesuai	Melakukan penyusunan laporan jumlah hasil pemeriksaan dan pengawasan terhadap obek pajak.	Tidak ada kendala		% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	Bidang Penagihan dan Pelaporan (31%)
3	Melaksanakan Tugas yang di Perintahkan Atasan (Hj Nurul Latifah)	Mencatat dan Mengetik Spj Perjalanan dinas, Spj Internet Wifi Kantor dan Atk	200 Berkas	200 Berkas	200 Berkas	102 Berkas	Sesuai	Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas lainnya	Tidak ada kendala		% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	Bidang Penagihan dan Pelaporan (51%)

Analisis Pemeriksaan Pajak

1	Menyiapkan data pemeriksaan terhadap berkas pajak daerah (Fauzi Rahman, S.AP)	Jumlah data pajak daerah yang tersusun	77 Data SKPD	77 Data SKPD	77 Data SKPD	42 Data SKPD	Sesuai	Jumlah data pajak daerah yang tersusun	Tidak ada kendala	% Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB	Data objek pajak (55%)
2	Menyiapkan bahan rencana pengawasan terhadap pemasangan alat pantau pembayaran online terhadap objek pajak (Fauzi Rahman, S.AP)	Jumlah data objek pajak yang dianalisa	97 Data SKPD	97 Data SKPD	97 Data SKPD	61 Data SKPD	Sesuai	Jumlah data objek pajak yang dianalisa	Tidak ada Kendala	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	Aplikasi Tapping Box (63%)
3	Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap objek pajak (Fauzi Rahman, S.AP)	Jumlah bahan laporan kegiatan pemeriksaan objek pajak yang dianalisa	22 Data SKPD	22 Data SKPD	22 Data SKPD	13 Data SKPD	Sesuai	Jumlah bahan laporan kegiatan pemeriksaan objek pajak yang dianalisa	Tidak ada kendala	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	Aplikasi Tapping Box (59%)

Analisis Penagihan dan Pengembalian

1	Menyiapkan Bahan Untuk mendistribusikan Surat Menyurat dan Dokumentasi yang berhubungan dengan Penagihan Pajak Daerah maupun Pajak Lainnya (Patmawati,S.Sos)	Jumlah Surat Menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan	2850 Laporan	2850 Laporan	2850 Laporan	1203 Laporan	Sesuai	Jumlah Surat Menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan	Tidak ada kendala	% Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB	Data wajib pajak dan objek pajak (42%)
2	Menyiapkan data penagihan Pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo (Patmawati,S.Sos)	Jumlah berkas penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	97 Laporan	Sesuai	Jumlah berkas penagihan pajak daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo		% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	Laporan dari Bidang Pendataan dan Penetapan (81%)

3	Mengumpulkan Bahan Penerimaan dan pengelolaan Pendapatan daerah yang berasal dari hasil Provinsi DID Lumpsom Payment dan Pendapatan Lainnya (Patmawati,S.Sos)	Jumlah berkas kegiatan penagihan, penerimaan dan pengelolaan pendapatan daerah yang berasal dari hasil provinsi, DID, lumpsom payment dan pendapatan lainnya	8000 Laporan	8000 Laporan	8000 Laporan	3469 Laporan	Sesuai	Jumlah berkas kegiatan penerimaan terkait pendapatan daerah yang bersumber dari bagi hasil provinsi, DID, lumpsom payment dan pendapatan lainnya (yang belum terdeteksi sumbernya)	Tidak ada kendala	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	Dari Bukti Transfer (43%)
---	---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--	-------------------	--------------------------------	---------------------------

Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

1	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) APBD dan Perubahan terfasilitasinya pelayanan pada masyarakat (Jumberi,S.Sos)	Menyusun Konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	15 Laporan	Sesuai	Angka Absolut		Menyusun Konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan	Renja APBD/Perubahan (15%)
2	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) APBD dan Perubahan terfasilitasinya pelayanan pada masyarakat (Jumberi,S.Sos)	Menyusun meentry konsep rencana program, kegiatan dan anggaran unit kerja	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	26 Laporan	Sesuai	Angka Absolut	Tidak ada kendala	Menyusun Konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan	Laporan Hasil Evaluasi Renja (26%)
3	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) APBD dan Perubahan terfasilitasinya pelayanan pada masyarakat (Jumberi,S.Sos)	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan, baik secara lisan maupun tertulis	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	59 Laporan	Sesuai	Jumlah Pelaksanaan	Tidak ada kendala	Menyusun Konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan	Agenda Surat Tugas (59%)
4	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) APBD dan Perubahan terfasilitasinya pelayanan pada masyarakat (Jumberi,S.Sos)	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	21 Laporan	Sesuai	Jumlah Pelaksanaan	Tidak ada Kendala	Menyusun Konsep satuan biaya pelaksanaan kegiatan	Agenda Surat Tugas (21%)

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1	Tersedianya Bahan / Data Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Monitoring Terkait Perencanaan Barang Milik Daerah untuk dihimpun, diolah dan disiapkan (Padeli Aprianoor, SE)	Jumlah data /bahan perencanaan barang milik daerah	180 Bahan	180 Bahan	180 Bahan	62 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan dan data perencanaan BMD yang siap disusun	Tidak ada kendala	Jumlah data /bahan perencanaan barang milik daerah	Usulan dari SKPD / Aplikasi Sipanda (34%)
2	Tersedianya Bahan / Data Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Monitoring Terkait Distribusi Barang Milik Daerah untuk dihimpun, diolah dan disiapkan (Padeli Aprianoor, SE)	Jumlah data /bahan distribusi barang milik daerah	158 Bahan	158 Bahan	158 Bahan	65 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan dan data distribusi BMD yang siap disusun	Tidak ada kendala	Jumlah data /bahan distribusi barang milik daerah	Usulan dari SKPD / Aplikasi Sipanda (41%)
3	Tersedianya Bahan / Data Koordinasi, Konsultasi, Evaluasi dan Monitoring Terkait Pemanfaatan Barang Milik Daerah untuk dihimpun, diolah dan disiapkan (Padeli Aprianoor, SE)	Jumlah data /bahan pemanfaatan barang milik daerah	213 Bahan	213 Bahan	213 Bahan	201 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan dan data pemanfaatan BMD yang siap disusun	Tidak ada kendala	Jumlah data /bahan pemanfaatan barang milik daerah	Usulan dari SKPD / Aplikasi Sipanda (94%)

Pramu Bakti

1	Tersedianya data surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, organisasi dan ketatalaksanaan (Mansyah)	Jumlah hasil pengelolaan ekspedisi surat menyurat	300 Surat	300 Surat	300 Surat	165 Surat	Sesuai	Jumlah hasil pelaksanaan surat yang diantar	Tidak ada Kendala	Agenda surat masuk dan surat keluar
---	--	---	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---	-------------------	-------------------------------------

2	Tersedianya data surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, organisasi dan ketatalaksanaan (Mansyah)	Jumlah hasil pelaksanaan urusan rumah tangga	350 Per Kegiatan	350 Per Kegiatan	350 Per Kegiatan	185 Per Kegiatan	Sesuai	Jumlah hasil pelaksanaan kegiatan kebersihan kantor	Tidak ada kendala
---	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--------	---	-------------------

Penyusun Rencana Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

1	Mengumpulkan Bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023 (Agus, S.AP)	Jumlah Bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023 yang dianalisa	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	Jumlah Bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023 yang dianalisa	Tidak ada kendala	Jumlah Bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023 yang dianalisa	RKA SKPD (20%)
2	Mengumpulkan Bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Murni TA. 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Murni TA. 2024 (Agus)	Jumlah Bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Murni TA. 2024 dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Murni TA. 2024	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	Sesuai	Jumlah Bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Murni TA. 2024 dan Penjabaran APBD Murni TA. 2024	Tidak ada kendala	Jumlah Bahan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Murni TA. 2024	RKA / RKAP SKPD (0%)
3	Memverifikasi RKA Perubahan/Pergeseran TA. 2023 dan RKA Murni TA 2024 (Agus)	Jumlah Bahan yang di verifikasi RKA Perubahan/Pergeseran TA. 2023 dan RKA Murni TA 2024	70 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	10 Dokumen	Sesuai	Jumlah Bahan yang di verifikasi RKA Perubahan/Pergeseran TA. 2023 dan RKA Murni TA 2024	Tidak ada kendala	Jumlah Bahan yang di verifikasi RKA Perubahan/Pergeseran TA. 2023 dan RKA Murni TA 2024	RKA / RKAP SKPD (14%)

Verifikator Keuangan

1	Tersedianya bukti - bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas Umum disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/ penelitian (Sri Tanjung Sari, A.Md)	Jumlah bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas	2873 Bukti	2873 Bukti	2873 Bukti	1108 Bukti	Sesuai	Bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/ penelitian	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Perundang-undangan RKA/ RKAP, DPA/DPAP, Anggaran Kas dan PK/IKU atas Langsung (39%)
2	Tersedianya hasil penelitian dan hasil pencocokan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya (Sri Tanjung Sari, A.Md)	Jumlah bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan Laporan Realisasi Keuangan dan Buku Kas	2873 Bukti	2873 Bukti	2873 Bukti	1108 Bukti	Sesuai	Jumlah bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan Laporan Realisasi Keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Perundang-undangan RKA/ RKAP, DPA/DPAP, Anggaran Kas dan PK/IKU atas Langsung (39%)
3	Tersedianya alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sri Tanjung Sari, A.Md)	Jumlah alat-alat bukti	2873 Bukti	2873 Bukti	2873 Bukti	1108 Bukti		Jumlah alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Perundang-undangan RKA/ RKAP, DPA/DPAP, Anggaran Kas dan PK/IKU atas Langsung (39%)
4	Tersedianya laporan hasil temuan pemeriksaan untuk memperoleh tindak lanjut dari Pimpinan (Sri Tanjung Sari, A.Md)	Jumlah laporan hasil temuan pemeriksaan	916 Berkas	916 Berkas	916 Berkas	519 Berkas	Sesuai	Jumlah laporan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan kepada Pimpinan	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Laporan Keuangan (57%)
5	Terlaksananya tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara lisan maupun tulisan (Sri Tanjung Sari, A.Md)	Jumlah tugas kedinasan lain baik secara lisan maupun tulisan	61 Surat Tugas	61 Surat Tugas	61 Surat Tugas	26 Surat Tugas	Sesuai	Jumlah tugas kedinasan lain yang diperintahkan secara lisan maupun tertulis oleh atasan	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Surat Undangan, Peraturan perjalanan dinas dan PK / IKU atasan langsung Perundang-Undangan (43%)

Analisis Transaksi Keuangan

1	Menyiapkan Bahan Untuk pencatatan berkas usul pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D) (Nur Hikmah, S.AP)	Jumlah Berkas usul pembuatan surat perintah pencairan dana yang dianalisa	11651 Data SPM	11651 Data SPM	11651 Data SPM	3568 Data SPM	Sesuai	Jumlah berkas usul pembuatan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang dianalisa	Tidak ada Kendala	Jumlah Berkas usul pembuatan surat perintah pencairan dana yang dianalisa	SPM (31%)
2	Menyiapkan Bahan untuk Pencatatan berkas SP2D yang Keluar (Nur Hikmah, S.AP)	Jumlah berkas SP2D yang sudah selesai yang dianalisa	11651 Data SP2D	11651 Data SP2D	11651 Data SP2D	2830 Data SP2D	Sesuai	Jumlah Berkas SP2D yang sudah selesai yang dianalisa	Tidak ada kendala	Jumlah berkas SP2D yang sudah selesai yang dianalisa	SP2D (24%)

Verifikator Data Laporan Keuangan

1	Tersedianya berkas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari SKPD (Retna Widiyantie, A.Md)	Mencatat syarat permintaan pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Daftar Gaji, tunjangan, honorarium dan sebagainya yang diajukan oleh SKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	11651 Lembar	11651 Lembar	11651 Lembar	3601 Lembar	Sesuai	Jumlah lembar	Tidak ada kendala	Mencatat syarat permintaan pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Daftar Gaji, tunjangan, honorarium dan sebagainya yang diajukan oleh SKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	SPP (31%)
2	Tersedianya Berkas Surat Permintaan Membayar (SPM) dari SKPD (Retna Widiyantie, A.Md)	Mencatat data perhitungan syarat permintaan pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Daftar Gaji, tunjangan, honorarium dan sebagainya yang diajukan oleh SKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	11651 Berkas	11651 Berkas	11651 Berkas	3601 Berkas	Sesuai	Jumlah lembar	Tidak ada kendala	Mencatat data perhitungan syarat permintaan pembayaran (SPP), Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), Daftar Gaji, tunjangan, honorarium dan sebagainya yang diajukan oleh SKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	SPP (31%)

3	Tersedianya berkas Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD (Retna Widiyantie, A.Md)	Menerima dan melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran	11651 Berkas	11651 Berkas	11651 Berkas	3601 Berkas	Sesuai	Jumlah Laporan	Tidak ada kendala	Menerima dan melakukan verifikasi dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Pengguna Anggaran	SPP (31%)
4	Tersedianya bahan dan berkas untuk menjalankan Kegiatan (Retna Widiyantie, A.Md)	Mengikuti pertemuan, bimtek dan acara kedinasan lainnya	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	25 Laporan	Sesuai	Jumlah laporan	Tidak ada kendala	Operator Aplikasi OMSPAN Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	DPA (45%)
5	Tersedianya bahan dan berkas untuk menjalankan Kegiatan (Retna Widiyantie, A.Md)	Operator Aplikasi OMSPAN Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	55 Laporan	55 Laporan	55 Laporan	11 Laporan	Sesuai	Jumlah laporan	Tidak ada kendala	Operator Aplikasi OMSPAN Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	SPP, SPM, SP2D (20%)

Bendahara 1

1	Menyiapkan berkas laporan keuangan (Muhammad Nasir)	Tersedianya berkas laporan keuangan	12 Berkas	12 Berkas	12 Berkas	6 Berkas	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (50%)
2	Menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan perbendaharaan agar sesuai prosedur yang berlaku (BKU, Reg SP2D, buku panjar, buku bank, pajak, rincian obyek, laporan fungsional dan rekening koran) (Muhammad Nasir)	Tersedianya Menyiapkan, melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan perbendaharaan agar sesuai prosedur yang berlaku (BKU, Reg SP2D, buku panjar, buku bank, pajak, rincian obyek, laporan fungsional dan rekening koran)	150 Berkas	150 Berkas	150 Berkas	72 Berkas	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (48%)

3	Mencatat dan memasukkan surat pertanggung jawaban kegiatan beserta kelengkapannya pada program aplikasi simda (GU) (Muhammad nasir)	Tersedianya Mencatat dan memasukkan surat pertanggung jawaban kegiatan beserta kelengkapannya pada program aplikasi simda (GU)	1600 Berkas	1600 Berkas	1600 Berkas	740 Berkas	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (46%)
4	Menyusun berkas dan melakukan pembayaran atas gaji dan penghasilan tambahan lainnya bagi karyawan (Muhammad Nasir)	Tersedianya Menyusun berkas dan melakukan pembayaran atas gaji dan penghasilan tambahan lainnya bagi karyawan	30 Berkas	30 Berkas	30 Berkas	22 Berkas	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (73%)
5	Mencatat, menyimpan dan mengembalikan uang ke atau dari bank pada buku bank guna kelancaran pelaksanaan tugas(buku bank) (Muhammad Nasir)	Tersedianya Mencatat, menyimpan dan mengembalikan uang ke atau dari bank pada buku bank guna kelancaran pelaksanaan tugas(buku bank)	170 Berkas	170 Berkas	170 Berkas	114 Berkas	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (67%)
6	Mencatat dan memasukkan data SPP dan SPM ke program aplikasi sesuai petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas (GU, LS dan UP) (Muhammad Nasir)	Tersedianya Mencatat dan memasukkan data SPP dan SPM ke program aplikasi sesuai petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas (GU, LS dan UP)	250 Berkas	250 Berkas	250 Berkas	108 Berkas	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (43%)
7	Mencatat penerimaan dan penyetoran pada buku pajak (Muhammad Nasir)	Tersedianya mencatat penerimaan dan penyetoran pada buku pajak	700 Berkas	700 Berkas	700 Berkas	370	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (53%)
8	Menyimpan dokumen (Berkas pertanggung jawaban) yang berkaitan dengan pengeluaran (Muhammad Nasir)	Tersedianya menyimpan dokumen (Berkas pertanggung jawaban) yang berkaitan dengan pengeluaran	24 Berkas	24 Berkas	24 Berkas	18 Berkas	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (75%)

9	Melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan (Muhammad Nasir)	Tersedianya melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan	12 Berkas	12 Berkas	12 Berkas	6 Berkas	Sesuai	Jumlah data yang dibuat	Tidak ada kendala	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	SPJ Pengeluaran (50%)
---	--	--	-----------	-----------	-----------	----------	--------	-------------------------	-------------------	---	-----------------------

Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

1	Tersedianya Data Aset dan Bahan Rekonsiliasi tahun 2022(I Wayan Sandy Sutrisna, A.Md)	Jumlah Data Aset dan Bahan Rekonsiliasi	31 Data	31 Data	31 Data	31 Data	Sesuai	Jumlah bahan laporan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah bahan laporan yang disusun	Aplikasi Sipanda 2022 (100%)
2	Tersedianya Data Aset dan Bahan Rekonsiliasi tahun 2023 (I Wayan Sandy Sutrisna, A.Md)	Jumlah Data Aset dan Bahan Rekonsiliasi	31 Data	31 Data	31 Data	0 Data	Sesuai	Jumlah bahan laporan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah bahan laporan yang disusun	Aplikasi Sipanda (0%)
3	Memonitor dan mengamankan hardware dan software server aplikasi aset (I Wayan Sandy Sutrisna, A.Md)	Jumlah backup data	60 Data	60 Data	60 Data	0 Data	Sesuai	Jumlah backup data	Tidak ada kendala	Jumlah backup data	Aplikasi Sipanda (0%)

Analisis Aset Daerah

1	Tersedianya Data Persediaan dan Bahan Rekonsiliasi tahun 2022 (Shella Cahyani, S.Ak)	Jumlah Data Persediaan dan Bahan Rekonsiliasi	31 Data	31 Data	31 Data	31 Data	Sesuai	Jumlah bahan laporan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah Data Persediaan dan Bahan Rekonsiliasi	Aplikasi Sicaper 2022 (100%)
2	Tersedianya Data Persediaan dan Bahan Rekonsiliasi tahun 2023 (Shella Cahyani, S.Ak)	Jumlah Data Persediaan dan Bahan Rekonsiliasi	31 Data	31 Data	31 Data	0 Data	Sesuai	Jumlah bahan laporan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah Data Persediaan dan Bahan Rekonsiliasi	Aplikasi Sicaper (0%)

3	Memonitor dan mengamankan hardware dan software server aplikasi persediaan (Shella Cahyani, S.Ak)	Jumlah backup data	60 Data	60 Data	60 Data	0 Data	Sesuai	Jumlah backup data	Tidak ada kendala	Jumlah backup data	Aplikasi Sicaper (0%)
---	--	--------------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------------------	-------------------	--------------------	-----------------------

Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris

1	Menerima Data Kebutuhan Barang Inventaris serta melakukan Serah Terima Barang (Nanang Hermansyah)	Terkumpulnya Data Kebutuhan Barang Inventaris Kantor	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	6 Dokumen	Sesuai	Jumlah Dokumen yang dibuat	Tidak ada kendala	Terkumpulnya Data Kebutuhan Barang Inventaris Kantor	DPA, Dokumen Kontrak (33%)
2	Membuat Laporan Barang Penggunaan Semeteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (Nanang Hermansyah)	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	105 Laporan	105 Laporan	105 Laporan	35 Laporan	Sesuai	Jumlah Laporan yang tersusun	Tidak ada kendala	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Pengguna pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Aplikasi Si Panda dan Aplikasi Si Mandor (33%)

Penyusun Laporan Keuangan

1	Tersedianya bahan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD (Farida Aulia Sari, SE)	Jumlah bahan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	200 Bahan	200 Bahan	200 Bahan	90 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah bahan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	Aplikasi (45%)
2	Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (Farida Aulia Sari, SE)	Jumlah bahan laporan keuangan daerah	20 Bahan	20 Bahan	20 Bahan	20 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan laporan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah bahan laporan keuangan daerah	Aplikasi, Laporan Keuangan SKPD (100%)
3	Tersedianya Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD (Farida Aulia Sari, SE)	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	15 Bahan	15 Bahan	15 Bahan	15 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Aplikasi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (100%)

4	Tersedianya bahan penyusunan laporan penjabaran pertanggungjawaban APBD untuk Raperbup (Farida Aulia Sari, SE)	Jumlah bahan penyusunan laporan penjabaran pertanggungjawaban APBD	15 Bahan	15 Bahan	15 Bahan	0 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan laporan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah bahan penyusunan laporan penjabaran pertanggungjawaban APBD	Aplikasi, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (0%)
5	Terlaksananya Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD (Farida Aulia Sari, SE)	Jumlah Berkas Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	120 Berkas	120 Berkas	120 Berkas	60 Berkas	Sesuai	Jumlah berkas Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah Berkas Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD	Aplikasi, Data Realisasi SKPD (50%)
6	Terumpulnya data dan arsip data rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran SKPD (Farida Aulia Sari, SE)	Jumlah berkas data rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD yang dikumpulkan dan diarsipkan	315 Berkas	315 Berkas	315 Berkas	150 Berkas	Sesuai	Jumlah berkas data rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD yang dikumpulkan dan diarsipkan	Tidak ada kendala	Jumlah berkas data rekonsiliasi laporan realisasi anggaran SKPD yang dikumpulkan dan diarsipkan	Berkas data Realisasi Anggaran SKPD (50%)
7	Terumpulnya arsip laporan keuangan SKPD (Farida Aulia Sari, SE)	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diarsipkan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	Sesuai	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang diarsipkan	Tidak ada kendala	Jumlah laporan keuangan SKPD yang diarsipkan	Laporan Keuangan SKPD (100%)
8	Tersedianya bahan penyusunan laporan realisasi APBD (Farida Aulia Sari, SE)	Jumlah bahan penyusunan laporan realisasi APBD	40 Bahan	40 Bahan	40 Bahan	0 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan penyusunan laporan realisasi APBD yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah bahan penyusunan laporan realisasi APBD	Aplikasi, Laporan Realisasi SKPD (0%)

Penyusun Laporan Keuangan

1	Tersedianya Data dan Bahan Rekonsiliasi Bulanan (Akhmad Rizani, S.A)	Jumlah Data dan Bahan Rekonsiliasi Bulanan	120 Berkas	120 Berkas	120 Berkas	60 Berkas	Sesuai	Jumlah bahan laporan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah Data dan Bahan Rekonsiliasi Bulanan	Aplikasi keuangan (50%)
2	Tersedianya Arsip Data Rekonsiliasi SKPD (Akhmad Rizani, S.Ak)	Jumlah Arsip Data Rekonsiliasi SKPD	120 Berkas	120 Berkas	120 Berkas	60 Berkas	Sesuai	Jumlah Arsip laporan SKPD	Tidak ada kendala	Jumlah Arsip Data Rekonsiliasi SKPD	Laporan pertanggungjawaban bendahara (50%)
3	Tersedianya Data dan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Akhmad Rizani, S.Ak)	Jumlah Data dan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Berkas	6 Berkas	6 Berkas	6 Berkas	Sesuai	Jumlah bahan laporan yang disusun	Tidak ada kendala	Jumlah Data dan Bahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Aplikasi Keuangan, Laporan BLUD, Laporan Dana Bos, Laporan FKTP, Aplikasi Aset (100%)

4	Tersedianya Draft Laporan Realisasi Anggaran Bulanan(Akhmad Rizani, S.Ak)	Jumlah Draft Laporan Realisasi Anggaran Bulanan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Berkas	Sesuai	Jumlah bahan laporan Tidak ada kendala yang disusun	Jumlah Draft Laporan Realisasi Anggaran Bulanan	Aplikasi keuangan (50%)
5	Tersedianya Draft Peraturan Daerah ttg Pertanggung jawaban (Akhmad Rizani, S.Ak)	Jumlah Draft Peraturan Daerah ttg Pertanggung jawaban	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	Sesuai	Jumlah bahan laporan Tidak ada kendala yang disusun	Jumlah Draft Peraturan Daerah ttg Pertanggung jawaban	Keuangan Laporan Audited Aplikasi Keuangan (0%)
6	Tersedianya Draft Peraturan Bupati ttg Pertanggung jawaban(Akhmad Rizani, S. Ak)	Jumlah Draft Peraturan Bupati ttg Pertanggung jawaban	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	Sesuai	Jumlah bahan laporan Tidak ada kendala yang disusun	Jumlah Draft Peraturan Bupati ttg Pertanggungjawaban	Aplikasi keuangan (0%)
7	Tersedianya Data dan Bahan Penginputan Saldo Awal Tahun Anggaran 2023 (Akhmad Rizani, S. Ak)	Jumlah Data dan Bahan Penginputan Saldo Awal Tahun Anggaran 2023	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	0 Laporan	Sesuai	Jumlah laporan saldo awal SKPD	Jumlah Data dan Bahan Penginputan Saldo Awal Tahun Anggaran 2023	Aplikasi keuangan (0%)
8	Tersedianya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu & Unaudited) (AKhmad Rizani, S.Ak)	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu & Unaudited)	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	Sesuai	Jumlah laporan yang di susun	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Reviu & Unaudited)	Aplikasi keuangan (100%)

Analisis Laporan Keuangan

1	Tersedianya Data dan Bahan Rekonsiliasi Bulanan SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Data dan Bahan Rekonsiliasi Bulanan	36 Bahan	36 Bahan	36 Bahan	19 Bahan	Sesuai	Jumlah bahan laporan Tidak ada kendala yang disusun	Jumlah Data dan Bahan Rekonsiliasi Bulanan	Aplikasi Keuangan (53%)
2	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Bulanan SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan SKPD	36 Berita Acara	36 Berita Acara	36 Berita Acara	19 Berita Acara	Sesuai	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi SKPD	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Bulanan SKPD	Aplikasi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (53%)
3	Tersedianya Arsip Data dan Berkas Rekonsiliasi Bulanan SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Arsip Data dan Berkas Rekonsiliasi Bulanan SKPD	36 Berita Acara	36 Berita Acara	36 Berita Acara	19 Berita Acara	Sesuai	Jumlah Arsip laporan pertanggungjawaban SKPD	Jumlah Arsip Data dan Berkas Rekonsiliasi Bulanan SKPD	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (53%)

4	Terlaksananya Kegiatan Rekonsiliasi Ganti Uang Persediaan SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Ganti Uang Persediaan SKPD	36 Berita Acara	36 Berita Acara	36 Berita Acara	15 Berita Acara	Sesuai	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Ganti Uang Persediaan SKPD	Tidak ada kendala	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Ganti Uang Persediaan SKPD	Aplikasi Keuangan (42%)
5	Tersedianya Arsip dan Berkas Rekonsiliasi Ganti Uang Persediaan SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Arsip dan Berkas Rekonsiliasi Ganti Uang Persediaan SKPD	36 Berkas	36 Berkas	36 Berkas	15 Berkas	Sesuai	Jumlah Arsip laporan pertanggungjawaban SKPD	Tidak ada kendala	Jumlah Arsip dan Berkas Rekonsiliasi Ganti Uang Persediaan SKPD	Aplikasi Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (42%)
6	Terlaksananya Jurnal Koreksi Belanja SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Jurnal Koreksi Belanja SKPD	10 Data	10 Data	10 Data	4 Data	Sesuai	Jumlah Jurnal Koreksi Belanja SKPD	Tidak ada kendala	Jumlah Jurnal Koreksi Belanja SKPD	Aplikasi Keuangan dan Surat Permohonan Jurnal Koreksi Belanja SKPD (40%)
7	Jumlah Arsip Data dan Berkas Surat Permohonan Jurnal Koreksi Belanja SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Arsip Data dan Berkas Surat Permohonan Jurnal Koreksi Belanja SKPD	10 Berkas	10 Berkas	10 Berkas	4 Berkas	Sesuai	Jumlah Arsip Data dan Berkas Jurnal Koreksi belanja SKPD	Tidak ada kendala	Jumlah Arsip Data dan Berkas Surat Permohonan Jurnal Koreksi Belanja SKPD	Aplikasi Keuangan dan Surat Permohonan Jurnal Koreksi Belanja SKPD (40%)
8	Terlaksananya Jurnal Pengembalian Kelebihan Belanja SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Jurnal Pengembalian Kelebihan Belanja SKPD	10 Data	10 Data	10 Data	2 Data	Sesuai	Jumlah Jurnal Pengembalian Belanja SKPD	Tidak ada kendala	Jumlah Jurnal Pengembalian Kelebihan Belanja SKPD	Aplikasi Keuangan dan Surat Permohonan Jurnal Pengembalian Kelebihan Belanja SKPD (20%)
9	Tersedianya Arsip Data dan Berkas Jurnal Pengembalian Kelebihan Belanja SKPD (Bima Syailendra, S.STP)	Jumlah Arsip Data dan Berkas Surat Permohonan Jurnal Pengembalian Kelebihan Belanja SKPD	10 Berkas	10 Berkas	10 Berkas	2 Data	Sesuai	Jumlah Arsip Data dan Berkas Jurnal Pengembalian belanja SKPD	Tidak ada kendala	Jumlah Arsip Data dan Berkas Surat Permohonan Jurnal Pengembalian Kelebihan Belanja SKPD	Aplikasi Keuangan dan Surat Permohonan Jurnal Pengembalian Kelebihan Belanja SKPD (20%)

Pengadministrasi Keuangan

1	Pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN, setiap bulan dan pelaporan reaktivasi Belanja Tidak Langsung dan penyetoran kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar luran dan Premi yang berdasarkan peraturan yang berlaku (Hidayatullah)	Proses Gaji ASN	1.600 Berkas	1.600 Berkas	1.600 Berkas	840 Berkas	Sesuai	Jumlah berkas	Tidak ada kendala	Proses Gaji ASN	Gaji dan Tunjangan (53%)
2	Pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN, setiap bulan dan pelaporan reaktivasi Belanja Tidak Langsung dan penyetoran kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar luran dan Premi yang berdasarkan peraturan yang berlaku (Hidayatullah)	Proses Laporan Belanja Pegawai	960 Berkas	960 Berkas	960 Berkas	480 Berkas	Sesuai	Jumlah Berkas	Tidak ada kendala	Proses Gaji ASN	Gaji dan Tunjangan (75%)
3	Pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN, setiap bulan dan pelaporan reaktivasi Belanja Tidak Langsung dan penyetoran kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayar luran dan Premi yang berdasarkan peraturan yang berlaku (Hidayatullah)	Proses Pemberhentian Pembayaran Gaji	130 Berkas	130 Berkas	130 Berkas	70 Berkas	Sesuai	Jumlah Berkas	Tidak ada kendala	Proses Gaji ASN	Gaji dan Tunjangan (54%)

Bendahara 2

1	Terlaksananya penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2023 (Ahmad Syafudin, S.Sos)	Jumlah berkas Pembayaran Pajak Daerah Tahun 2023	2000 Berkas	2000 Berkas	2000 Berkas	682 Berkas	Sesuai	Jumlah berkas Pembayaran Pajak Daerah yang masuk	Tidak Ada Kendala	'Persentase Kesesuaian Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	- Berkas penerimaan yang masuk (SSPD dan Rekening Koran) (34%)
2	Tersedianya Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak Daerah Tahun 2023 (Ahmad Syafudin, S.Sos)	Jumlah Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak Daerah Tahun 2023	2000 Berkas	2000 Berkas	2000 Berkas	682 Berkas	Sesuai	Jumlah Tanda Bukti Pembayaran (TBP) Pajak Daerah yang diterbitkan	Tidak Ada Kendala	'Persentase Kesesuaian Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	TBP di Aplikasi Simda NG (34%)
3	Tersedianya Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Daerah Tahun 2023 (Ahmad Syafudin, S.Sos)	Jumlah Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Daerah Tahun 2023	2000 Berkas	2000 Berkas	2000 Berkas	682 Berkas	Sesuai	Jumlah Surat Tanda Setoran (STS) Pajak Daerah yang diterbitkan	Tidak Ada Kendala	'Persentase Kesesuaian Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	STS di Aplikasi Simda NG (34%)
4	Terlaksananya penyetoran Penerimaan Pajak Daerah ke Kas Daerah Tahun 2023 (Ahmad Syafudin, S.Sos)	Jumlah penyetoran Penerimaan Pajak Daerah ke Kas Daerah Tahun 2023	2000 Berkas	2000 Berkas	2000 Berkas	682 Berkas	Sesuai	Jumlah uang yang sudah disetorkan ke Kas Daerah	Tidak Ada Kendala	'Persentase Kesesuaian Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Rekap STS
5	Membuat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2023 (Ahmad Syafudin, S.Sos)	Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Tahun 2023	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	Sesuai	Jumlah Dokumen Laporan Bulanan hasil pelaksanaan tugas	Tidak Ada Kendala	'Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	Terlaksananya Rekon Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 (38%)
6	Terlaksananya Rekon Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 (Ahmad Syafudin, S.Sos)	Jumlah laporan Rekon Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	3 Dokumen	Sesuai	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan PAD	Tidak Ada Kendala	'Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku	BA Dokumen Hasil Rekon (38%)

Analisis Pendapatan Daerah

1	Tersedianya bahan untuk pendaftaran BPHTB (Siti Aisyah, SE)	Jumlah berkas pendaftaran BPHTB yang masuk	180 Berkas	180 Berkas	180 Berkas	60 Berkas	Sesuai	Jumlah berkas BPHTB yang masuk	Tidak ada kendala	Jumlah berkas pendaftaran BPHTB yang masuk	Rekap jumlah pendaftaran BPHTB (21%)
2	Tersedianya bahan untuk memproses pendaftaran daftar baru PBB-P2 berupa SPOP/LSPOP PBB-P2 yang telah diisi oleh wajib pajak (Siti Aisyah, S.E)	Jumlah berkas daftar baru (SPOP PBB-P2 yang telah diisi oleh wajib pajak)	420 Berkas	420 Berkas	420 Berkas	200 Berkas	Sesuai	Jumlah SPOP PBB-P2 daftar baru yang diterima	Tidak ada kendala	Jumlah berkas daftar baru (SPOP PBB-P2 yang telah diisi oleh wajib pajak)	Aplikasi SISMIOP PBB-P2 (48%)
3	Tersedianya bahan untuk memproses pendaftaran pembetulan/mutasi PBB-P2 berupa SPOP/LSPOP PBB-P2 yang telah diisi oleh wajib pajak	Jumlah berkas pembetulan/mutasi (SPOP PBB-P2 yang telah diisi oleh wajib pajak)	360 Berkas	360 Berkas	360 Berkas	171 Berkas	Sesuai	Jumlah SPOP PBB-P2 pembetulan/mutasi yang diterima	Tidak ada kendala	Jumlah berkas pembetulan/mutasi (SPOP PBB-P2 yang telah diisi oleh wajib pajak)	Aplikasi SISMIOP PBB-P2 (48%)

Pengelola Data Pengkajian dan Perawatan

1	Terlaksannya Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Balangan (M. Norlamsyah, A.Md)	Jumlah aset tanah Daerah yang akan dibuatkan sertifikat	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	Sesuai	Jumlah Aset	Tidak ada kendala		Aplikasi Open Aset
2	Terlaksannya Proses Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan (M. Norlamsyah, A.Md)	Jumlah Aset Daerah yang akan dihibahkan	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	Sesuai	Jumlah Aset	Tidak ada kendala		Aplikasi Open Aset
3	Terlaksannya Proses Penjualan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan Langsung (M. Norlamsyah, A.Md)	Jumlah Penjualan Barang Milik Daerah Melalui Penjualan Langsung	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	Sesuai	Jumlah Aset	Tidak ada kendala		Aplikasi Open Aset

4	Terlaksannnya Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (M. Norlamsyah, A.Md)	Jumlah Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	54 Laporan	Sesuai	Jumlah Aset	Tidak ada kendala				Aplikasi Open Aset
---	--	--	------------	------------	------------	------------	--------	-------------	-------------------	--	--	--	--------------------

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (ISMAH WARDANI, SE,MM) Murni	% Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disampaikan tepat waktu	Tidak ada kendala	Melaksanakan Moniv Capaian Realisasi TW 1 sd TW 4	161.880.100	Persentase ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disampaikan Tepat Waktu	Terarsipkannya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar terkait realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu (50%)
2	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (ISMAH WARDANI, SE,MM) Murni	% Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Tidak ada kendala	Penyusunan Dokumen Perencanaan	51.349.700	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Terarsipkannya dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disampaikan tepat waktu secara berkala

Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

1	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tidak ada Kendala	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi	161.880.100	Persentase ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Disampaikan Tepat Waktu	Terarsipnya dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang telah disampaikan tepat waktu secara berkala
2	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Tidak ada kendala	Penyusunan dokumen Perencanaan perangkat daerah	51.349.700	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	Terarsipnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah disampaikan tepat waktu secara berkala

3	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terlaksananya laporan keuangan daerah disampaikan tepat waktu	Tidak ada kendala	Penyusunan laporan keuangan SKPD	65.125.500	Persentase Laporan Keuangan Akhir sesuai ketentuan perundang-undangan	Melakukan penyampaian laporan keuangan daerah secara berkala dan tepat waktu
4	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Dokumen Keuangan Yang Di Verifikasi	100%	100%	100%	0%	Sesuai	Tersedianya dokumen keuangan yang di verifikasi	Tidak ada kendala	Evaluasi kegiatan Verifikasi Dokumen Keuangan	130.985.800	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Terarsipnya dokumen keuangan yang sudah terverifikasi secara berkala
5	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Pelaksanaan Bimtek Implementasi Perundang-Undangan	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terlaksananya bimtek implementasi perundang-undangan	Tidak ada kendala	Monitoring Kegiatan Bimtek	2.383.000.000	Persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dilakukannya Bimtek secara berkala
6	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Tidak ada kendala	Monitoring Ketersediaannya Kegiatan Penerangan Bangunan Kantor	92.394.100	Persentase ketersediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Adanya sistem penerangan bangunan kantor yang dikelola dengan baik
7	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tidak ada kendala	Melaksanakan Monitoring Pembelian Barang	1.221.760.300	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Melakukan pengecekan serta pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
8	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	Tidak ada kendala	Evaluasi pelaksanaan ketersediaannya Barang Cetak dan Penggandaan	15.490.800	Persentase ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Melakukan pengadaan barang keperluan cetakan dan penggandaan

9	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	75%	Sesuai	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dan terpenuhinya makanan dan minuman	Tidak ada kendala	Monitoring kegiatan Rapat Koordinasi	292.415.000	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Adanya Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah secara berkala, dan pengadaan makanan dan minuman terkait dilakukannya rapat-rapat koordinasi secara berkala
10	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya jasa surat menyurat	Tidak ada kendala	Evaluasi hasil Inventarisasi Surat Masuk dan Surat Keluar		Persentase ketersediaan Jasa Surat Menyurat sesuai Kebutuhan	
11	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Terbayarnya Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	Tidak ada kendala	Monitoring ketersediaan air, listrik dan Internet	576.968.000	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melakukan pembayaran tiap bulannya jasa Komunikasi, air dan listrik
12	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tidak ada kendala	Evaluasi hasil Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	147.921.000	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Adanya SDM pengelola peralatan dan tersedianya perlengkapan kantor
13	Nilai AKIP Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (Drs. AKHMAD SYAIFULLAH ABDI) Murni	% Ketersediaan Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Tidak ada kendala	Evaluasi perihal Pembelian alat tulis kantor sesuai kebutuhan		Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Dilakukannya pengecekan ATK dan pembelian ATK sesuai kebutuhan

Kepala Bidang Layanan, Pendataan dan Penetapan

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (ABDUL HALIM, SE) Murni	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	100%	600%	100%	50%	Sesuai	Terselenggaranya penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	Tidak ada kendala	Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi terkait kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah, Memaksimalkan Pelayanan Pajak daerah dengan Layanan Pembayaran secara Online dan sinkronisasi data antara PBB dan BPHTB dilapangan serta Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya Pembayaran Pajak PBB dan BPHTB	1.341.728.600	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah	50%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (ABDUL HALIM, SE) Murni	% Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terselenggaranya Penerimaan PAD selain PBB P-2 dan BPHTB	Tidak ada kendala	Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi terkait kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah, Memaksimalkan Pelayanan Pajak daerah dengan Layanan Pembayaran secara Online dan sinkronisasi data antara PBB dan BPHTB dilapangan serta Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya Pembayaran Pajak PBB dan BPHTB	-	Penerimaan PAD selain PBB P-2 dan BPHTB	50%

3	Meningkatnya Potensi Pajak Daerah (Abdul Halim, SE.MM) Perubahan	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	100%	600%	100%	50%	Sesuai	Meningkatnya Pajak Daerah	Potensi Tidak Ada Kendala	Melaksanakan Koordinasi dan Evaluasi terkait kegiatan Pendataan Objek Pajak Daerah, Memaksimalkan Pelayanan Pajak daerah dengan Layanan Pembayaran secara Online dan sinkronisasi data antara PBB dan BPHTB dilapangan serta Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya Pembayaran Pajak PBB dan BPHTB	1.341.728.600	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	50%
---	---	------------------------------------	------	------	------	-----	--------	---------------------------	---------------------------	--	---------------	------------------------------------	-----

Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Halim Murasyid, ST,MA) Murni	Persentase Pendapatan Non PAD	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tertindakannya pendapatan Non PAD	Tidak Ada Kendala	Melakukan sosialisasi akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu	1.715.911.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pajak Daerah	50%
2	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak (Halim Murasyid,ST.MA) Perubahan	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	Sesuai	Meningkatnya pendapatan pajak daerah	Rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya wajib pajak	Melakukan sosialisasi akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu	1.715.911.000	Persentase kepatuhan wajib pajak	0%
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah (Halim Murasyid,ST.MA) Perubahan	Jumlah Laporan Realisasi APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Laporan	Sesuai	Laporan Realisasi APBD	Tidak Ada Kendala	Melakukan sosialisasi akan pentingnya pembayaran pajak tepat waktu	-	Jumlah Laporan Realisasi APBD	50%

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Kamrani, SE) Murni	Persentase aset tanah yang bersertifikat dan yang telah diajukan pendaftaran sertifikat	80%	80%	80%	80%	Sesuai	Tersedianya aset tanah yang berseertifikat dan yang telah diajukan pendaftaran sertifikat	Titik rawan yaitu BMD yang merupakan fasilitas ASN atau BMD yang bergerak sedangkan Pengamanan BMD khususnya terkait tanah terdapat berbagai kendala baik dari sisi pemenuhan kelengkapan pengajuan sertipikat maupun pada saat dilakukan proses pengukur tanah dilapangan	Mengkoordinasikan perihal pembuatan Pakta Integritas penggunaan BMD bagi ASN, pemasangan qrcode pada BMD (Simandor BMD) dan untuk proses sertifikasi tanah perlu lebih banyak dilakukan penelusuran terhadap data dukung administratif kepemilikan tanah dan peningkatan SDM pengelola BMD di SKPD	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Kamrani, SE) Murni	Persentase pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang selesai dilaksanakan	80%	80%	80%	28%	Sesuai	Terlaksananya pemindahtanganan barang milik daerah	Terdapat sejumlah barang milik daerah yang dinyatakan hilang maupun tidak ditemukan fisiknya namun masih tercatat sebagai barang milik daerah	Melaksanakan sensus barang milik daerah secara menyeluruh menggunakan sistem Barcode barang yang terintegrasi dengan sistem pencatatan BMD yang ditindaklanjuti dengan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) terhadap BMD yang dinyatakan hilang diakibatkan kelalian dan lain sebagainya serta melaksanakan proses penghapusan BMD sesuai dengan regulasi terhadap objek BMD yang sudah tidak dapat ditemukan atau tidak dapat ditelusuri	3.203.370.400	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	28%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Kamrani, SE) Murni	Persentase penyelesaian LBMD Tahunan	100%	100%	100%	0%	Sesuai	Terselenggaranya penyelesaian LBMD tahunan	Tidak ada Kendala	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	0%

4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Kamrani, SE) Murni	Persentase RKBMD yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Tersedianya RKBMD yang disusun sesuai dengan kondisi eksisting	Belum optimalnya penerapan sesuai regulasi	Koordinasi dalam membangun komitmen bersama pengelola barang dan pengguna barang	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	100%
5	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pengelolaan BMD (Kamrani, SE.MM) Perubahan	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Nilai Indeks IPA dengan Katagori "Baik"	Nilai Indeks IPA dengan Katagori "Baik"	Nilai Indeks IPA dengan Katagori "Baik"	0%	Sesuai	Indeks Pengelolaan Aset Daerah pada Kategori "Baik"	Tidak Ada Kendala	Mengkoordinasikan seluruh stakeholder terkait dalam rangka kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan regulasi	3.203.370.400	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	0%

Kepala Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (NORWANTO, SE) Murni	% SKPD yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terselenggaranya SKPD yang menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	Tidak ada Kendala	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi dengan SKPD terkait Laporan Keuangan yang disampaikan SKPD Sampai Pusat	2.503.525.000	Opini BPK	50%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (NORWANTO, SE) Murni	% Laporan Keuangan Daerah disampaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terlaksananya laporan keuangan daerah disampaikan tepat waktu	Tidak ada Kendala	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi dengan SKPD terkait Laporan Keuangan yang disampaikan SKPD Sampai Pusat	-	Persentase pelaksanaan pelaporan keuangan daerah yang disampaikan	Opini BPK (50%)
3	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan (Norwanto,SE) Perubahan	% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Opini BPK	Kurangnya data dukung dan banyaknya SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan	Melakukan Koordinasi dan Evaluasi dengan SKPD terkait Laporan Keuangan yang disampaikan SKPD	2.503.525.000	Opini BPK	WTP (50%)

Kepala Bidang Anggaran

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Rizani Rahman, ST) Murni	Rancangan APBD disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terlaksananya rancangan APBD di sampaikan tepat waktu	Tidak ada Kendala	Dilakukannya perancangan APBD serta disampaikan dengan tepat waktu	2.810.984.900	Persentase pelaksanaan rancangan APBD yang disampaikan tepat waktu	50%
---	--	--	------	------	------	-----	--------	---	-------------------	--	---------------	--	-----

6	Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan (Agustina Wulandari, A.Md) Murni	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	18 Laporan	Sesuai	Terlaksannya Laporan Pelaksanaan Tugas	Tidak ada kendala	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023	(75%)	
7	Menyajikan informasi keuangan daerah (Agustina Wulandari, A.Md) Murni	Jumlah Laporan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	10 Laporan	Sesuai	Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semestaran SKPD	Tidak ada kendala	Menelaah Berkas yang belum lengkap -, Menagih Bukti dan Data Dukung Ke SKPD - -. Melakukan Pembinaan dan Menyampaikan Informasi Terapdate Ke SKPD Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD Tahun Anggaran 2023	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023	(50%)
8	Menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan (Agustina Wulandari, A.Md) Murni	Jumlah Rancangan Perda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	(Agustina Wulandari, A.Md) Murni	Sesuai	Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD	Tidak ada kendala	Mengumpulkan data - terkait Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023	(100%)

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya kualitas Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD (Muhammad Lutfi Pratama, SKM) Perubahan	Jumlah peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	Perda & Perkada APBD Perubahan TA.2023	Tersusunnya peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tidak Ada Kendala	Melaksanakan Penyusunan Buku APBD Murni Kabupaten Balangan	-	Waktu penetapan Raperda & Raperbup tentang Perubahan APBD sesuai ketentuan	Tersusunnya raperda & raperbup tentang Perubahan APBD tepat waktu (0%)
2	Terpenuhinya standar dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran (Muhammad Lutfi Pratama, SKM) Perubahan	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran Yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Pedoman Penyusunan APBD	Tersusunnya dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tidak Ada Kendala	Melaksanakan Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Balangan	-	Waktu penetapan dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran sesuai ketentuan	Tersusunnya dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran tepat waktu (100%)

1	Melakukan Pengeluaran dan Penerimaan Serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Erwin Efisa, S.Kom) Murni	Verifikasi Surat Perintah Pencairan Dana	12000 Berkas	12000 Berkas	12000 Berkas	3534 Berkas	Sesuai	Terverifikasinya Surat Perintah Pencairan Dana	lambatnya pengajuan pencairan dari SKPD	menghimbau kepada SKPD agar sesegeranya melakukan percepatan pencairan	-	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	29%
2	Melakukan Pengeluaran dan Penerimaan Serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Erwin Efisa, S.Kom) Murni	Verifikasi Surat Pengesahan Belanja	2580 Berkas	2580 Berkas	2580 Berkas	1290 Berkas	Sesuai	Terverifikasinya Surat Pengesahan Belanja	lambatnya pengajuan SP2B dari SKPD terkait	menghimbau kepada SKPD agar sesegeranya melakukan percepatan pengajuan SPB	-	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	50%
3	Melakukan Pengeluaran dan Penerimaan Serta Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Erwin Efisa, S.Kom) Murni	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0 Kegiatan	Sesuai	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak ada kendala-	-	-	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0%
4	Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan BUD (Erwin Efisa, S.Kom) Perubahan	Jumlah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana yang terverifikasi	15000 Berkas	15000 Berkas	15000 Berkas	3534 Berkas	Sesuai	Terverifikasinya Surat Perintah Pencairan Dana	lambatnya pengajuan pencairan dari SKPD	menghimbau kepada SKPD agar sesegeranya melakukan percepatan pencairan	-	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	24%
5	Terpenuhinya Dokumen Penatausahaan BUD (Erwin Efisa, S.Kom) Perubahan	Jumlah Surat Pengesahan Belanja yang diverifikasi	2580 Berkas	2580 Berkas	2580 Berkas	1290 Berkas	Sesuai	Terverifikasinya Surat Pengesahan Belanja	lambatnya pengajuan SP2B dari SKPD terkait	menghimbau kepada SKPD agar sesegeranya melakukan percepatan pengajuan SPB	-	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	50%

6	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah (Erwin Efisa, S.Kom) Perubahan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	0	Sesuai	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak ada kendala-			% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	0%	melakukan pemberitahuan pada SKPD untuk melakukan percepatan realisasi
JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda														
1	Terpenuhinya Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Daerah (HAIRENA, SE) Murni	Jumlah Berkas terverifikasi persyaratan pengajuan SPP UP, GU, TU, LS Daftar Gaji, Tunjangan, Honorarium dan sebagainya yang diajukan oleh SKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	15.000 Berkas	15.000 Berkas	15.000 Berkas	3534 Berkas	Sesuai	Terverifikasinya berkas persyaratan pengajuan	Lambatnya Pengajuan SPM dari SKPD	Melakukan pemberitahuan kepada SKPD untuk melakukan percepatan realisasi	-	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	24%	melakukan pemberitahuan pada SKPD untuk melakukan percepatan realisasi
2	Terpenuhinya Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Daerah (HAIRENA, SE) Murni	Jumlah Berkas terverifikasi data perhitungan SPP UP, GU, TU, LS Daftar Gaji, Tunjangan, Honorarium dan sebagainya yang diajukan oleh SKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	15.000 Berkas	15.000 Berkas	15.000 Berkas	3534 Berkas	Sesuai	Terverifikasinya Data Perhitungan	Lambatnya Pengajuan SPM dari SKPD	Melakukan pemberitahuan kepada SKPD untuk melakukan percepatan realisasi	-	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	24%	melakukan rapat dengan TAPD terhadap kebijakan perubahan perda dan perkada APBD
3	Terpenuhinya Dokumen Pencairan Pembayaran Belanja Daerah (HAIRENA, SE) Murni	Jumlah Berkas terverifikasi dokumen SPM UP, GU, TU, LS Daftar Gaji, Tunjangan, Honorarium dan sebagainya yang diajukan oleh SKPD sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas	15.000 Berkas	15.000 Berkas	15.000 Berkas	3534 Berkas	Sesuai	Terverifikasinya Dokumen SPM	Lambatnya Pengajuan SPM dari SKPD	Melakukan pemberitahuan kepada SKPD untuk melakukan percepatan realisasi	-	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	24%	melakukan sosialisasi atas kebijakan dan regulasi terkait penganggaran daerah

4	Terpenuhinya standar dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran (Muhammad Lutfi Pratama, SKM) Perubahan	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran Yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	Pedoman Penyusunan APBD	Tersusunnya dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	Tidak Ada Kendala	Melaksanakan Penyusunan Buku Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Balangan	-	Waktu penetapan dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran sesuai ketentuan	Tersusunnya dokumen regulasi kebijakan anggaran bidang anggaran tepat waktu (0%)
---	--	---	-----------	-----------	-----------	---	-------------------------	--	-------------------	---	---	---	--

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Rancangan APBD disampaikan tepat waktu (Muhammad Haziqi, SE) Murni	Tersusunnya Kebijakan Umum APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	Sesuai KUA & PPAS TA.2024	Tersusunnya Dokumen KUA dan Dokumen PPAS sesuai Standar	Tidak ada Kendala	Melaksanakan Penyusunan Buku KUA & PPAS Kabupaten Balangan	-	Jumlah penetapan KUA dan PPAS APBD yang sesuai ketentuan	0%
2	Rancangan APBD disampaikan tepat waktu (Muhammad Haziqi, SE) Murni	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	Sesuai KUA & PPAS Perubahan TA.2023	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Dokumen Perubahan PPAS sesuai standar	Tidak ada Kendala	Melaksanakan Penyusunan Buku Perubahan KUA & PPAS Kabupaten Balangan	-	Jumlah penetapan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan APBD yang sesuai ketentuan	0%
3	Rancangan APBD disampaikan tepat waktu (Muhammad Haziqi, SE) Murni	Terlaksananya Pendampingan / Asistensi Penyusunan DPA Perubahan & DPA Murni	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Sesuai DPA SKPD yang sudah divalidasi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan / Asistensi Penyusunan DPA SKPD	Tidak ada kendala	Melakukan Verifikasi & Validasi komponen pendapatan dan belanja pada dokumen DPA di aplikasi SIPD	-	Jumlah DPA SKPD yang diteliti dan disahkan dibandingkan dengan jumlah DPPA SKPD x 100%	50%
4	Terpenuhinya standar penyusunan dokumen KUA dan PPAS (Muhammad Haziqi, SE) Perubahan	Jumlah Dokumen KUA dan Dokumen PPAS Yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	KUA & PPAS TA.2024	Tersusunnya Dokumen KUA dan Dokumen PPAS sesuai Standar	Tidak ada kendala	Melaksanakan Penyusunan Buku KUA & PPAS Kabupaten Balangan	-	Jumlah penetapan KUA dan PPAS APBD yang sesuai ketentuan	Tersusunnya KUA dan PPAS tepat waktu (0%)
5	Terpenuhinya standar dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS (Muhammad Haziqi, SE) Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Dokumen Perubahan PPAS Yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	KUA & PPAS Perubahan TA.2023	Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Dokumen Perubahan PPAS sesuai standar	ada kendala, keterlambatan penyusunan dokumen RKPD yang menjadi dasar penyusunan KUA & PPAS	Melaksanakan Penyusunan Buku Perubahan KUA & PPAS Kabupaten Balangan	-	Jumlah penetapan KUA Perubahan dan PPAS Perubahan APBD yang sesuai ketentuan	Tersusunnya KUA dan PPAS Perubahan tepat waktu (0%)

6	Terpenuhinya standar penyusunan DPA SKPD (Muhammad Haziqi, SE) Perubahan	Jumlah Kegiatan Pendampingan / Asistensi Penyusunan DPA SKPD Yang Terlaksana	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	Dokumen DPA SKPD yang sudah divalidasi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan / Asistensi Penyusunan DPA SKPD	Tidak ada kendala	Melakukan Verifikasi & Validasi komponen pendapatan dan belanja pada dokumen DPA di aplikasi SIPD	-	Jumlah DPA SKPD yang diteliti dan disahkan dibandingkan dengan jumlah DPPA SKPD x 100%	"Prosentase Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang diteliti dan disahkan" (50%)
---	---	--	------------	------------	------------	------------	--	---	-------------------	---	---	--	---

JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Rancangan APBD disampaikan tepat waktu (Sri Wahyunita, S.Sos) Murni	Terlaksananya Pendampingan / Asistensi Penyusunan RKA Perubahan & RKA Murni	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	Sesuai RKA SKPD yang sudah diverifikasi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan / Asistensi Penyusunan RKA SKPD	Tidak ada kendala	Melakukan Verifikasi & Penelaahan komponen pendapatan dan belanja pada dokumen RKA di aplikasi SIPD	-	Jumlah RKA SKPD yang diteliti dan disahkan dibandingkan dengan jumlah RKA SKPD x 100%	50%
2	Rancangan APBD disampaikan tepat waktu (Sri Wahyunita, S.Sos) Murni	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Murni	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	2 Dokumen	Sesuai Perda & Perkada tentang APBD TA.2024	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tidak ada kendala	Melaksanakan Penyusunan Buku APBD Perubahan Kabupaten Balangan	-	Jumlah penetapan Raperda & Raperbup tentang APBD sesuai ketentuan	50%
3	Terpenuhinya standar penyusunan RKA SKPD (Sri Wahyunita, S.Sos) Perubahan	Jumlah Kegiatan Pendampingan / Asistensi Penyusunan RKA SKPD Yang Terlaksana	30 Dokumen	30 Dokumen	30 Dokumen	15 Dokumen	RKA SKPD yang sudah diverifikasi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan / Asistensi Penyusunan RKA SKPD	Tidak Ada Kendala	Melakukan Verifikasi & Penelaahan komponen pendapatan dan belanja pada dokumen RKA di aplikasi SIPD	-	Jumlah RKA SKPD yang diteliti dan disahkan dibandingkan dengan jumlah RKA SKPD x 100%	"Prosentase Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang diteliti dan disahkan" (50%)
4	Meningkatnya kualitas Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD (Sri Wahyunita, S.Sos) Perubahan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0	Perda & Perkada tentang APBD TA.2024	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tidak ada kendala	Melaksanakan Penyusunan Buku APBD Perubahan Kabupaten Balangan	-	Jumlah penetapan Raperda & Raperbup tentang APBD sesuai ketentuan	Tersusunnya raperda & raperbup tentang APBD tepat waktu (0%)

Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

kerja sub perencanaan laporan yang disusun	Tidak
erumusan Kinerja Pemerintah, dan LKPI SKPD dah disusun	Tidak
ring, evaluasi laporan naan tugas in insidental gian naan dan an yang sudah nakan	Tidak
asi dan un laporan i kinerja dan realisasi SKPD yang dilaksanakan	Tidak
PK	Tidak Kendala

2	Meningkatnya Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pengelolaan BMD (Fakhriyanto, S.Pt.MP) Perubahan	Predikat Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Baik	Baik	Baik	0	Sesuai	Indeks Pengelolaan Aset Daerah pada Kategori "Baik"	Tidak ada kendala	Evaluasi hasil koordinasikan seluruh stakeholder terkait dalam rangka kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang sesuai dengan regulasi	3.203.370.400	s Pengelolaan Aset Daerah pada Kategori "Baik"	Tahun 2022 : (2,2) =
3	Meningkatnya Pendapatan Daerah (Fakhriyanto, S.Pt.MP) Perubahan	Persentase Peningkatan Pendapatan	100%	600%	100%	50%	Sesuai	Terlaksananya Penerimaan Pendapatan	Tidak Ada Kendala	Melaksanakan Koordinasi dengan bidang terkait	3.057.639.600	Persentase Peningkatan Pendapatan	50%
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Fakhriyanto,S.Pt.MP) Murni	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah	6%	6%	6%	0%	Sesuai	Meningkatkan Potensi Pendapatan Daerah	Tidak Ada Kendala	Tersediannya Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	3.057.639.600	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	0%
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Fakhriyanto,S.Pt.MP) Murni	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Perimbangan	8%	8%	8%	0%	Sesuai	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Perimbangan	Tidak Ada Kendala	Monitoring terhadap Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Perimbangan	1.866.165.297.092	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Perimbangan	0%
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Fakhriyanto,S.Pt.MP) Murni	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	90%	90%	90%	0%	Sesuai	Indeks Pengelolaan Aset Daerah pada Katagori Baik	Tidak Ada Kendala	Evaluasi Koordinasi Seluruh Stakeholder terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah	3.203.370.400	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tahun 2022,: (2,2) = "Baik" (0%)
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Fakhriyanto,S.Pt.MP) Murni	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	Sesuai	Opini BPK	Tidak Ada Kendala	Evaluasi Hasil Audit BPK Terhadap Laporan Keuangan	309.853.037.350	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Audit BPK yang dilaksanakan 2 Kali dalam satu tahun (100%) WTP
8	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Fakhriyanto,S.Pt.MP) Murni	IPM Penatausahaan Keuangan	3%	3%	3%	0%	Sesuai	Meningkatkan IPM Penatausahaan Keuangan	Tidak Ada Kendala	-	-	IPM Penatausahaan Keuangan	0%
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Reformasi Birokrasi (Fakhriyanto,S.Pt.MP) Murni	Rancangan APBD disampaikan Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	0	Sesuai	Penetapan Rancangan APBD	Tidak Ada Kendala	Monitoring Pelaksanaan Penetapan APBD disampaikan Tepat Waktu	2.810.984.900	Persentase Rancangan APBD disampaikan Tepat Waktu	0%

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah (GIZA NOERCHOLIS, SE.MM) Perubahan	Persentase Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan dan Transper Lainnya melalui Aplikasi dari Pusat	100%	100%	100%	40%	Sesuai	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan dan Transper Lainnya melalui Aplikasi dari Pusat	Syarat salur beberaoa sumber dana dari APBN belum terpenuhi	Menyampaikan kepada Tim pelaksana teknis di SKPD untuk bisa memperhatikan syarat penyaluran untuk beberapa bidang aktifitas yg bersumber dari APBN	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	40%
2	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah (GIZA NOERCHOLIS, SE.MM) Perubahan	Persentase Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan Penysetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100%	100%	100%	29%	Sesuai	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan Penysetoran	Tidak Ada Kendala	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyesuaian data	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	29%
3	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan Kas Daerah (GIZA NOERCHOLIS, SE.MM) Perubahan	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Pemantauan Data Transaksi Non Tunai dengan Bank	100%	100%	100%	29%	Sesuai	Terlaksananya Koordinasi dengan Bank terkait Pemantauan Data Transaksi Non Tunai	Integrasi aplikasi masih membutuhkan beberapa penyesuaian	Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi bersama bank untuk monitoring Kas	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	29%
4	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Pengembangan dan Dana Transper Lainnya (GIZA NOERCHOLIS, SE) Murni	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan dan Transper Lainnya melalui Aplikasi dari Pusat	100%	100%	100%	40%	Sesuai	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan dan Transper Lainnya melalui Aplikasi dari Pusat	Syarat salur beberaoa sumber dana dari APBN belum terpenuhi	Menyampaikan kepada Tim pelaksana teknis di SKPD untuk bisa memperhatikan syarat penyaluran untuk beberapa bidang aktifitas yg bersumber dari APBN	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	40%

5	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (GIZA NOERCHOLIS, SE) Murni	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%	100%	100%	29%	Sesuai	Terlaksananya Koordinasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan Penyetoran	Tidak Ada Kendala	Melakukan koordinasi dengan bidang terkait untuk penyesuaian data	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	29%
6	(GIZA NOERCHOLIS, SE) Murni		100%	100%	100%	29%	Sesuai	Terlaksananya Koordinasi dengan Bank terkait Pemantauan Data Transaksi Non Tunai	Integrasi aplikasi masih membutuhkan beberapa penyesuaian	Melaksanakan koordinasi dan rekonsiliasi bersama bank untuk monitoring Kas	% Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	29%

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Aspihani, S.AP) Perubahan	% Permasalahan Rekonsiliasi Pada Laporan Keuangan yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Berita Acara Rekonsiliasi	Ada Kendala yaitu Kurangnya data dukung dan banyaknya SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan	Menelaah Berkas yang belum lengkap - Menagih Bukti dan Data Dukung Ke SKPD - Melakukan Pembinaan dan Menyampaikan Informasi Terapdate Ke SKPD Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD Tahun Anggaran 2023	% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	50%
2	Meningkatnya Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Aspihani, S.AP) Perubahan	% Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	0%	Sesuai	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ada Kendala yaitu Kurangnya data dukung dan banyaknya SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan	Melakukan Identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022	% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP	0%

3	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah (Aspihani, S.AP) Murni	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Entitas Akuntansi	50 BAR	50 BAR	50 BAR	25 BAR	Sesuai	Berita Acara Rekonsiliasi	Tidak Ada kendala	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil laporan realisasi anggaran bulanan SKPD Tahun Anggaran 2023	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023	50%
4	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah (Aspihani, S.AP) Murni	Jumlah bahan konsep dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70 Konsep	70 Konsep	70 Konsep	15 Konsep	Sesuai	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak Ada kendala	Melakukan Identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023	21%
5	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait belanja daerah (Aspihani, S.AP) Murni	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi terkait Realisasi Belanja SKPD	100 BAR	100 BAR	100 BAR	25 BAR	Sesuai	Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Belanja SKPD	Tidak Ada kendala	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023	25%
6	Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan (Aspihani, S.AP) Murni	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	6 Laporan	Sesuai	Terlaksannya Laporan Pelaksanaan Tugas	Tidak Ada kendala	Menelaah Berkas yang belum lengkap -. Menagih Bukti dan Data Dukung Ke SKPD -. Melakukan Pembinaan dan Menyampaikan Informasi Terapdate Ke SKPD Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD Tahun Anggaran 2023	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023	25%

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Khairiyati, SE) Perubahan	% Permasalahan Rekonsiliasi Pada Laporan Keuangan yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Berita Acara Rekonsiliasi	Ada Kendala yaitu Menelaah Berkas yang - Kurangnya data belum lengkap -. dukung dan Menagih Bukti dan banyaknya SKPD Data Dukung Ke SKPD yang terlambat -. Melakukan menyampaikan Pembinaan dan Laporan Menyampaikan Informasi Terapdate Ke SKPD Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD Tahun Anggaran 2023	% Laporan Keuangan 50% Pemerintah Daerah sesuai SAP
2	Meningkatnya Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Khairiyati, SE) Perubahan	% Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	0%	Sesuai	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ada Kendala yaitu Melakukan Kurangnya data Identifikasi dan dukung dan inventarisasi data banyaknya SKPD terkait laporan yang terlambat keuangan daerah menyampaikan Tahun Anggaran 2022 Laporan	% Laporan Keuangan 0% Pemerintah Daerah sesuai SAP
3	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah (Khairiyati, SE) Murni	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Entitas Akuntansi	120 BAR	120 BAR	120 BAR	60 BAR	Sesuai	Berita Acara Rekonsiliasi	Tidak ada kendala Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil laporan realisasi anggaran bulanan SKPD Tahun Anggaran 2023	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 WTP (50%)
4	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah (Khairiyati, SE) Murni	Jumlah bahan konsep dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	60 Konsep	60 Konsep	60 Konsep	30 Konsep	Sesuai	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak ada kendala Melakukan Identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 (50%)
5	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait belanja daerah (Khairiyati, SE) Murni	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi terkait Realisasi Belanja SKPD	60 BAR	60 BAR	60 BAR	30 BAR	Sesuai	Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Belanja SKPD	Tidak ada kendala Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 (50%)
6	Menyajikan informasi keuangan daerah (Khairiyati, SE) Murni	Jumlah Laporan Keuangan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	Sesuai	Laporan Keuangan Triwulan dan Semestaran	Tidak ada kendala	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 (50%)

7	Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan (Khairiyati, SE) Murni	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	Sesuai	Terlaksannya Laporan Pelaksanaan Tugas	Tidak ada kendala	Menelaah Berkas yang belum lengkap - Menagih Bukti dan Data Dukung Ke SKPD - Melakukan Pembinaan dan Menyampaikan Informasi Terapdate Ke SKPD Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD Tahun Anggaran 2023	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 (50%)
---	---	----------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------	--	-------------------	--	---

JF Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya Kualitas Rekonsiliasi Laporan Keuangan (Agustina Wulandari, A.Md) Perubahan	% Permasalahan Rekonsiliasi Pada Laporan Keuangan yang Ditindak Lanjuti	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Berita Acara Rekonsiliasi	Ada Kendala yaitu Kurangnya data dukung dan banyaknya SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan	Menelaah Berkas yang belum lengkap - Menagih Bukti dan Data Dukung Ke SKPD - Melakukan Pembinaan dan Menyampaikan Informasi Terapdate Ke SKPD Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD Tahun Anggaran 2023	% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP 50%
2	Meningkatnya Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah (Agustina Wulandari, A.Md) Perubahan	% Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	0%	Sesuai	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Ada Kendala yaitu Kurangnya data dukung dan banyaknya SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan	Melakukan Identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022	% Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP 0%
3	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan daerah (Agustina Wulandari, A.Md) Murni	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan Bulanan Entitas Akuntansi	67 BAR	67 BAR	67 BAR	33 BAR	Sesuai	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tidak ada Kendala	Melakukan Identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 WTP (49%)

4	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah (Agustina Wulandari, A.Md)) Murni	Jumlah bahan konsep dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	70 Konsep	70 Konsep	70 Konsep	30 Konsep	Sesuai	Melakukan Identifikasi dan inventarisasi data terkait laporan keuangan daerah Tahun Anggaran 2022	Tidak ada kendala	-	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 (43%)
5	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait belanja daerah (Agustina Wulandari, A.Md)) Murni	Jumlah Berita Acara Rekonsiliasi terkait Realisasi Belanja SKPD	100 BAR	100 BAR	100 BAR	60 BAR	Sesuai	Berita Acara Rekonsiliasi Realisasi Belanja SKPD	Tidak ada kendala	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait laporan keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 (60%)
6	Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan (Agustina Wulandari, A.Md)) Murni	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	12 Laporan	Sesuai	Terlaksannya Laporan Pelaksanaan Tugas	Tidak Ada kendala	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil laporan realisasi anggaran bulanan SKPD Tahun Anggaran 2023	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 WTP (50%)
7	Menyajikan informasi keuangan daerah (Agustina Wulandari, A.Md)) Murni	Jumlah Laporan dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	10 Laporan	Sesuai	Laporan Realisasi Anggaran Triwulan dan Semestaran SKPD	Tidak ada kendala	Menelaah Berkas yang belum lengkap - Menagih Bukti dan Data Dukung Ke SKPD - Melakukan Pembinaan dan Menyampaikan Informasi Terupdate Ke SKPD Melaksanakan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja SKPD Tahun Anggaran 2023	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 (50%)
8	Menyusun konsep pengembangan sistem informasi keuangan (Agustina Wulandari, A.Md)) Murni	Jumlah Rancangan Perda	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	Sesuai	Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD	Tidak ada kendala	Mengumpulkan data terkait Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2022	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan TA 2023 (0%)

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1	Terlaksananya Penyusunan Standard Harga, Penyusunan RKBMD (Hairil Anwari, S.Sos) Perubahan	Tersusunnya SSH, ASB dan RKBMD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sesuai	Penetapan Kepala Daerah tentang SSH maupun ASB, Penetapan Pengelola Barang tentang RKBMD	Belum optimalnya penerapan sesuai regulasi	Membangun komitmen bersama pengelola barang dan pengguna barang	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Tahun 2022 : (2,2) = "Baik" (100%)
2	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Balangan (Hairil Anwari, S.Sos) Perubahan	Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah Terkait Pengelolaan BMD	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sesuai	Terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah Terkait Pengelolaan BMD	Tidak Ada Kendala	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Tahun 2022 : (2,2) = "Baik" (100%)
3	Terlaksananya Kegiatan Pemamfaatan Barang Milik Daerah (Hairil Anwari,S.Sos) Perubahan	Tersedianya Naskah Perjanjian Pemamfaatan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	5 Dokumen	Sesuai	Terbitnya Naskah Perjanjian Pemamfaatan Barang Milik Daerah	Tidak Ada Kendala	Lebih selektif lagi dalam penentuan mekanisme pemanfaatan, baik berupa sewa, pinjam pakai maupun yang dioperasikan pihak lain	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	50%
4	Terlaksananya Penyusunan Standar Harga (Hairil Anwari,S.Sos) Murni	Tersusunnya SSH dan ASB	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Sesuai	Penetapan Kepala Daerah tentang SSH maupun ASB, Penetapan Pengelola Barang tentang RKBMD	Belum optimalnya penerapan sesuai regulasi	Membangun komitmen bersama pengelola barang dan pengguna barang	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Tahun 2022 : (2,2) = "Baik" (100%)
5	Terlaksananya Penyusunan RKBMD (Hairil Anwari,S.Sos) Murni	Tersusunnya RKBMD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	Penetapan Kepala Daerah tentang Pengelola Barang tentang RKBMD	Belum optimalnya penerapan sesuai regulasi	Membangun komitmen bersama pengelola barang dan pengguna barang	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Tahun 2022 : (2,2) = "Baik" (100%)
6	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Hairil Anwari,S.Sos) Murni	Tersedianya Surat Keputusan Kepala Daerah Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	Sesuai	Terbitnya Surat Keputusan Kepala Daerah Terkait Pengelolaan BMD	Tidak Ada Kendala	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	Tahun 2022 : (2,2) = "Baik" (100%)

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1	Terlaksananya Inventarisasi BMD (Faisal Pratama, SE) Perubahan	Tersusunnya Lembar Kerja Inventarisasi Berdasarkan Kriteria Inventarisasi	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	0	Sesuai	Tertibnya Penyusunan Lembar Kerja Inventarisasi Berdasarkan Kriteria Inventarisasi	Objek inventarisasi sulit diidentifikasi karena data lama yang tidak akurat maupun yang sulit ditelusuri keberadaannya fisiknya	Penelusuran dari dokumen pengadaan maupun informasi yang menanganinya sebelumnya dan membuat aplikasi penatausahaan BMD yang handal, memuat informasi lengkap BMD melalui "Sipanda BMD"	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	0%
2	Terlaksananya Penyusunan LBMD (Faisal Pratama, SE) Perubahan	Tersusunnya Buku Laporan LBMD Aset dan LBMD Persediaan	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	0	Sesuai	Tertibnya Penyusunan Buku Laporan LBMD Aset dan LBMD Persediaan	Tidak Ada Kendala	-	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	0%
3	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Balangan (Faisal Pratama, SE) Perubahan	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi Pengelolaan BMD Aset dan Persediaan dengan SKPD	120 Berita Acara	120 Berita Acara	120 Berita Acara	60 Berita Acara	Sesuai	Terlaksananya Rekonsiliasi Pengelolaan BMD Aset dan Persediaan dengan SKPD	Tidak Ada Kendala	-	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	50%
4	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah (Faisal Pratama, SE) Murni	Tersusunnya Lembar Kerja Inventarisasi Berdasarkan Kriteria Inventarisasi	8 Laporan Kriteria Hasil Inventarisasi	8 Laporan Kriteria Hasil Inventarisasi	8 Laporan Kriteria Hasil Inventarisasi	0	Sesuai	Tertibnya Penyusunan Lembar Kerja Inventarisasi Berdasarkan Kriteria Inventarisasi	Objek inventarisasi sulit diidentifikasi karena data lama yang tidak akurat maupun yang sulit ditelusuri keberadaannya fisiknya	Penelusuran dari dokumen pengadaan maupun informasi yang menanganinya sebelumnya dan membuat aplikasi penatausahaan BMD yang handal, memuat informasi lengkap BMD melalui "Sipanda BMD"	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	0%
5	Terlaksananya Penyusunan LBMD Pemerintah Kabupaten Balangan (Faisal Pratama, SE) Murni	Tersusunnya Buku Laporan LBMD Aset dan LBMD Persediaan	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	0	Sesuai	Tertibnya Penyusunan Buku Laporan LBMD Aset dan LBMD Persediaan	Tidak Ada Kendala	-	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	0%

6	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan (Faisal Pratama,SE) Murni	Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasi	120 Berita Acara Rekonsiliasi	120 Berita Acara Rekonsiliasi	120 Berita Acara Rekonsiliasi	60 Berita Acara Rekonsiliasi	Sesuai	Terlaksananya Rekonsiliasi Pengelolaan BMD Aset dan Persediaan dengan SKPD	Tidak Ada Kendala	-	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	50%
---	--	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--------	--	-------------------	---	---	--------------------------------	-----

JF Analis Kebijakan Ahli Muda

1	Terlaksananya Pengamanan BMD (Rahmat Nofriyadi, S.AP.MM) Perubahan	Jumlah BMD yang dilakukan Pengamanan Administratif dan Fisik BMD	100 Register	100 Register	100 Register	49 Register	Sesuai	Terlaksananya Pengamanan, Administratif dan Fisik BMD	Titik rawan yaitu BMD yang merupakan fasilitas ASN atau BMD yang bergerak sedangkan Pengamanan BMD khususnya terkait tanah terdapat berbagai kendala baik dari sisi pemenuhan kelengkapan pengajuan sertipikat maupun pada saat dilakukan proses pengukur tanah dilapangan	Membuat Pakta Integritas penggunaan BMD bagi ASN, pemasangan qrcode pada BMD (Simandor BMD) dan untuk proses sertifikasi tanah perlu lebih banyak dilakukan penelusuran terhadap data dukung administratif kepemilikan tanah dan peningkatan SDM pengelola BMD di SKPD	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	49%
2	Terlaksananya Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD (Rahmat Nofriyadi, S.AP.MM)	Jumlah Aset BMD yang dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan pada Daftar BMD	800 Objek	800 Objek	800 Objek	222 Objek	Sesuai	Terlaksananya Aset BMD yang dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan pada Daftar BMD	Seringnya tidak tepat waktu pada saat pengajuan dan kekurangan kelengkapan berkas pengajuan dari SKPD	Lebih intensif melakukan sosialisasi terhadap SOP pemindahtanganan dan penghapusan BMD	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	28%

3	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD Pemerintah Kabupaten Balangan (Rahmat Nofriyadi,S.AP.MM) Perubahan	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan BMD pada SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	0	Sesuai	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan BMD pada SKPD	Pengelolaan BMD Usulan penambahan pada SKPD belum optimal dilaksanakan yang salah satunya karena kekurangan SDM dan masih minimnya pengetahuan dan kepedulian terhadap pengelolaan BMD	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	0%	
4	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah (Rahmat Nofriyadi,S.AP.MM) Murni	Jumlah Barang Milik Daerah yang dilakukan Pengamanan, Aset Tanah yang dilakukan Pengukuran dan Pengajuan Permohonan Pendaftaran Tanah	100 Register	100 Register	100 Register	49 Register	Sesuai	Terlaksananya Pengamanan, Administratif dan Fisik BMD	Titik rawan yaitu BMD yang merupakan fasilitas ASN atau BMD yang bergerak sedangkan Pengamanan BMD khususnya terkait tanah terdapat berbagai kendala baik dari sisi pemenuhan kelengkapan pengajuan sertipikat maupun pada saat dilakukan proses pengukur tanah dilapangan	Membuat Pakta Integritas penggunaan BMD bagi ASN, pemasangan qrcode pada BMD (Simandor BMD) dan untuk proses sertifikasi tanah perlu lebih banyak dilakukan penelusuran terhadap data dukung administratif kepemilikan tanah dan peningkatan SDM pengelola BMD di SKPD	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	49%
5	Terlaksananya Kegiatan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Rahmat Nofriyadi,S.AP.MM) Murni	Jumlah Aset Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan pada Daftar Barang Milik Daerah	800 Register	800 Register	800 Register	222 Register	Sesuai	Terlaksannya Aset BMD yang dilakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan pada Daftar BMD	Seringnya tidak tepat waktu pada saat pengajuan dan kekurangan kelengkapan berkas pengajuan dari SKPD	Lebih intensif melakukan sosialisasi terhadap SOP pemindahtanganan dan penghapusan BMD	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	28%

6	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Rahmat Nofriyadi,S.AP.MM) Murni	Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	0	Sesuai	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Pengelolaan BMD pada SKPD	Pengelolaan BMD Usulan penambahan pada SKPD belum optimal dilaksanakan yang salah satunya karena kekurangan SDM dan masih minimnya pengetahuan dan kepedulian terhadap pengelolaan BMD	-	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	0%
---	---	---	---------	---------	---------	---	--------	---	--	---	--------------------------------	----

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Rachmadi Santoso, ST) Perubahan	Jumlah Hasil Verifikasi Pendataan dan Penetapan Objek dan Wajib Pajak Daerah serta Retribusi Daerah yang dikelola BPKPAD dalam bentuk Karcis	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	Sesuai	Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Tidak Ada Kendala	Pendataan Objek Pajak Daerah dan Verifikasi Surat Ketetapan Pajak	-	% Penerimaan Pajak Daerah	0%
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah (Rachmadi Santoso, ST) Murni	Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	Sesuai	Tersusunnya Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Tidak Ada Kendala	Pendataan Objek Pajak Daerah dan Verifikasi Surat Ketetapan Pajak	-	Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	0%

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya Kualitas Layanan Pajak (Nor Kamariah, SE) Perubahan	% Pajak Daerah yang Terlayani	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	Sesuai	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tidak Ada Kendala	Memaksimalkan Pelayanan Pajak Daerah dengan Layanan Pembayaran Pajak Secara Online	-	% Penerimaan Pajak Daerah	50%
2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (Nor Kamariah, SE) Murni	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Layanan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Dokumen	Sesuai	Tersusunnya Dokumen Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tidak Ada Kendala	Memaksimalkan Pelayanan Pajak Daerah dengan Layanan Pembayaran Pajak Secara Online	-	Dokumen Laporan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	50%

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah (Norsahid Imanullah, ST.MM) Perubahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kurangnya sinkronisasi data antara data PBB dan BPHTB dilapangan	Dilakukan pengecekan langsung dilapangan	-	% Penerimaan Pajak Daerah	33%
2	Melaksanakan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Norsahid Imanullah, ST.MM) Perubahan	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB	100%	100%	100%	25%	Sesuai	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan BPHTB	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB dan BPHTB	-	% Penerimaan Pajak Daerah	25%
3	Perencanaan Pengelolaan pajak Daerah (Norsahid Imanullah, ST) Murni	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kurangnya sinkronisasi data antara data PBB dan BPHTB dilapangan	Dilakukan pengecekan langsung dilapangan	-	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	50%
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Norsahid Imanullah, ST) Murni	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB	100%	100%	100%	25 %	Sesuai	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB dan BPHTB	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembayaran PBB dan BPHTB	-	Terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB	25%

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya Pengendalian Pajak Daerah (Agustina, SE) Perubahan	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak yang Terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	Sesuai	Terlaksannnya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Tidak Ada Kendala	Melaksanakan penyulugan/sosialisasi	-	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak yang Terlaksana	50%
2	Meningkatnya Pengendalian Pajak Daerah (Agustina, SE) Perubahan	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	Sesuai	Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tidak Ada Kendala	Melaksanakan monitoring lapangan	-	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	50%

3	Tersusunnya Laporan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah (Agustina, SE) Perubahan	Jumlah Laporan Peneitian dan Data Pelaporan Pajak Daerah yang terverifikasi	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	Sesuai	Terverifikasinya Laporan Penelitian dan Data Pelaporan Pajak Daerah	Tidak Ada Kendala	Melakukan verifikasi/validasi data	-	Jumlah Laporan Penelitian dan Data Pelaporan Pajak Daerah yang terverifikasi	50%
4	Penyuluhan dan Peyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Agustina, SE) Murni	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak yang Terlaksana	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	Sesuai	Terlaksannnya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak	Tidak ada kendala	Melaksanakan penyulugan/sosialisasi	-	Jumlah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak yang Terlaksana	50%
5	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah (Agustina, SE) Murni	Jumlah Laporan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	Sesuai	Tersusunnya Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tidak ada kendala	Melaksanakan monitoring lapangan	-	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	50%
6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah (Agustina, SE) Murni	Jumlah Dokumen Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	Sesuai	Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Tidak ada kendala	Melakukan verifikasi/validasi data	-	Jumlah Jumlah Laporan Penerimaan Pendapatan Daerah	50%

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

1	Meningkatnya Kualitas Penagihan Atas Piutang Pajak dan Retribusi Daerah (Julfitri Akbar, S.Sos) Perubahan	Jumlah Piutang Pajak Daerah Yang Ditagih	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	Sesuai	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	Tidak Ada kendala	Melakukan pendatanan piutang dan penagihan atas pajak terutang	-	Jumlah Piutang Pajak Daerah Yang Ditagih	50%
2	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Julfitri Akbar, S.Sos) Perubahan	Jumlah Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah Yang Terlayani	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	Terlayannya Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah	Tidak Ada kendala	Menindaklanjuti atas pengajuan keberatan dan banding pajak	-	Jumlah Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah Yang Terlayani	25%
3	Penagihan Pajak Daerah (Julfitri Akbar, S.Sos) Murni	Jumlah Piutang Pajak Daerah Yang Ditagih	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	Sesuai	Tertagihnya Piutang Pajak Daerah	Tidak ada kendala	Melakukan pendatanan piutang dan penagihan atas pajak terutang	-	Jumlah Piutang Pajak Daerah Yang Ditagih	50%

4	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Julfitri Akbar, S.Sos) Murni	Jumlah Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah Yang Terlayani	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	Sesuai	Terlayannya Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah	Tidak ada kendala	Menindaklanjuti atas pengajuan keberatan dan banding pajak	-	Jumlah Pengajuan Keberatan dan Banding Pajak Daerah Yang Terlayani	25%
---	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--	-------------------	--	---	--	-----

Kepala Sub Bagian Keuangan

1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Triana, S.Kom.MM) Murni	% Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Tidak Ada Kendala	Terlaksananya Laporan Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	65.125.500	Persentase Laporan Keuangan Akhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Adanya pengarsipan laporan keuangan setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Triana, S.Kom.MM) Murni	% Dokumen Keuangan Yang Di Verifikasi	100%	100%	100%	0%	Sesuai	Tersedianya dokumen keuangan yang di verifikasi	Tidak Ada Kendala	Memverifikasi Dokumen Keuangan Lebih teliti	130.985.800	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Dilakukannya proses verifikasi dokumen keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Pelaksanaan Birtek Implementasi Perundang-Undangan	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terlaksananya birtek implementasi perundang-undangan	Tidak Ada Kendala	Terlaksananya Birtek	2.383.000.000	Persentase pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dilakukannya BIMTEK implementasi perundang-undangan secara berkala (50%)
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	Tidak Ada Kendala	Terlaksananya Penerangan Bangunan Kantor	92.394.100	Persentase ketersediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Adanya sistem penerangan bangunan kantor (100%)
3	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tidak Ada Kendala	Melaksanakan Pembelian Barang secara Spesifikasi	1.221.760.300	Persentase ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Adanya peralatan dan perlengkapan kantor (100%)

4	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	100%	100%	100%	Sesuai	Terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	Tidak Ada Kendala	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	15.490.800	Persentase ketersediaan Barang Cetakan dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Adanya pengadaan barang keperluan cetakan dan penggandaan (100%)
5	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dan terpenuhinya makanan dan minuman	Tidak Ada Kendala	Melaksanakan Rapat Koordinasi	292.415.000	Persentase terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dilakukannya Rapat Koodinasi Intern dan Konsultasi ke luar daerah, Pengadaan makanan dan minuman terkait kegiatan rapat-rapat koordinasi tersebut (100%)
6	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Ketersediaan Jasa Surat Menyurat Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya jasa surat menyurat	Tidak Ada Kendala	Inventarisasi Surat Masuk dan Surat Keluar	-	Persentase ketersediaan Jasa Surat Menyurat sesuai Kebutuhan	Melakukan pengarsipan setiap surat masuk dan surat keluar secara berkala (50%)
7	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Terbayarnya Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	Tidak Ada Kendala	Terbayarnya kebutuhan air, listrik dan Internet	576.968.000	Persentase terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Melakukan pembayaran tiap bulannya jasa Komunikasi, air dan listrik (50%)
8	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Ketersediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Berkurangnya Peralatan dan perlengkapan kantor yang rusak	Tidak Ada Kendala	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan baik	147.921.000	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa peralatan dan Pengadaan Perlengkapan Kantor
9	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (MUHAMMAD NOROL GIANTO, SH) Murni	% Ketersediaan Alat Tulis Kantor Sesuai Kebutuhan	100%	100%	100%	50%	Sesuai	Tersedianya alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Tidak Ada Kendala	Pembelian alat tulis kantor sesuai kebutuhan	-	Persentase ketersediaan alat tulis kantor sesuai kebutuhan	Dilakukannya pengecekan ATK dan tersedianya ATK sesuai kebutuhan (50%)

Analisis Pajak dan Retribusi Daerah

1	Tersedianya Data Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah (Rudiansyah, S.Kom)	Jumlah Data Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	160 Dokumen	160 Dokumen	160 Dokumen	91 Dokumen Sesuai	Jumlah Data Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Tidak ada kendala	% Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB	B IX dari Bank (57%)
2	Tersedianya data rekon yang siap untuk di proses (Rudiansyah, S.Kom)	Jumlah Data Rekon yang telah diserahkan oleh Bendahara Penerimaan	70 Dokumen	70 Dokumen	70 Dokumen	26 Dokumen Sesuai	Jumlah Data Rekon yang telah diserahkan oleh Bendahara Penerimaan	Tidak ada kendala	% Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB	B IX dari Bank dan SKPD Pemungut (37%)

Analisis Laporan Keuangan Transfer Daerah

1	Merekapitulasi dan Mengarsip SP2D (Nurul Adawiyah, SE)	Jumlah SP2D yang direkap dan diarsip	15000 Berkas	15000 Berkas	15000 Berkas	3535 Berkas Sesuai	Jumlah berkas SP2D yang direkap dan diarsip	Tidak ada kendala	Jumlah SP2D yang direkap dan diarsip	SP2D (24%)
2	Mencetak Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (Nurul Adawiyah, SE)	Jumlah Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dicetak	230 Laporan	230 Laporan	230 Laporan	81 Laporan Sesuai	Jumlah Laporan Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dicetak	Tidak ada kendala	Jumlah Register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dicetak	SP2D (35%)
3	Mencetak Laporan Realisasi Pengeluaran Kas Berdasarkan SP2D (Nurul Adawiyah,SE)	Jumlah BKU BUD yang dicetak	230 Laporan	230 Laporan	230 Laporan	115 Laporan Sesuai	Jumlah Laporan BKU BUD yang dicetak	Tidak ada kendala	Jumlah BKU BUD yang dicetak	SP2D dan Rekening Koran Kasda (50%)
4	Mencetak Laporan Rekonsiliasi Bank (Nurul Adawiyah,SE)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Bank yang dicetak	230 Laporan	230 Laporan	230 Laporan	115 Laporan Sesuai	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Bank yang dicetak	Tidak ada kendala	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Bank yang dicetak	SP2D (50%)

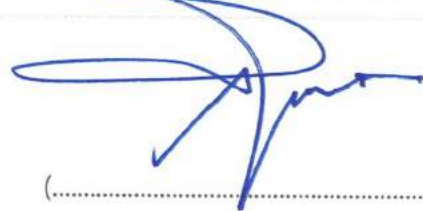
Pengadministrasi Pajak

1	Tertibnya penerimaan surat menyurat untuk kegiatan penagihan pajak daerah terkait penagihan pajak daerah dengan semua dokumentasinya (Akhmad Heriadi)	Jumlah surat masuk yang diterima terkait dengan penagihan pajak daerah	200 Surat	150 Surat	150 Surat	129 Surat Sesuai	Surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah	Tidak ada kendala	Jumlah surat masuk yang diterima terkait dengan penagihan pajak daerah	Dokumen surat (65%)
---	--	--	-----------	-----------	-----------	------------------	---	-------------------	--	---------------------

2	Terlaksananya kegiatan memilah dan mengklasifikasikan berkas pajak daerah sesuai dengan jenis pajak (Akhmad Heriadi)	Jumlah surat masuk yang diterima terkait dengan penagihan pajak daerah	120 Surat	120 Surat	120 Surat	24 Surat	Sesuai	Surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah	Tidak ada kendala	Jumlah surat masuk yang diterima terkait dengan penagihan pajak daerah	Dokumen surat (20%)
3	Terlaksananya penagihan pajak parkir (Akhmad Heriadi)	Jumlah rumah makan dilakukan penagihan	180 Dokumen	180 Dokumen	180 Dokumen	55 Dokumen	Sesuai	Jumlah rumah makan dilakukan penagihan		Jumlah rumah makan dilakukan penagihan	Dokumen SPTPD (31%)
4	Terdistribusinya surat terkait dengan penagihan pajak (Akhmad Heriadi)	Jumlah surat yang terdistribusi sehubungan dengan pajak daerah	100 Surat	150 Surat	150 Surat	61 Surat	Sesuai	Jumlah surat yang terdistribusi sehubungan dengan pajak daerah	Tidak ada kendala	Jumlah surat yang terdistribusi sehubungan dengan pajak daerah	Dokumen surat (41%)

Pengadministrasi Umum

1	Tersedianya bahan laporan pelaksanaan Kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian (Nanang Hermansyah)	Bahan laporan pelaksanaan Kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan			Jumlah bahan laporan yang disusun			
2	Tersedianya surat menyurat, ekspedisi, dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, organisasi dan ketatalaksanaan (Nanang Hermansyah)	Jumlah hasil Pengelolaan surat menyurat, Ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, aset, Humas, keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan.	95 Surat	95 Surat	95 Surat			Jumlah data yang dibuat			



(.....)

FAKHRIYANTO, S.Pt, MP

197806012005011016

Mengetahui

Tim MONEV SAKIP PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

1. FAKHRIYANTO, S.Pt, MP

(.....)